

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dana pensiun ASN (Aparatur Sipil Negara) periode 2001 Q1 – 2022 Q4 dengan skema PAYG (*pay as you go*) yang tidak didanai (*unfunded*) tidak berkelanjutan dan dapat membebani APBN di masa depan dan tidak berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa dana pensiun juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan fiskal di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling berkaitan. Yang dimana, dana pensiun sebagai independen setiap tahunnya mengalami kenaikan dan berpengaruh terhadap primary defisit. Semakin banyaknya dana pensiun yang dikeluarkan oleh APBN maka akan semakin tinggi pula primary defisit.

Pengelolaan skema dana pensiun saat ini dengan skema PAYG (*pay as you go*) dapat menyebabkan tidak berkelanjutan dan dapat membebani APBN di masa depan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan defisit anggaran dan utang pemerintah, Namun juga membahayakan stabilitas fiskal dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban lainnya. Selain itu juga, penelitian ini selaras dengan (Gayithri 2009) bahwa skema pendanaan PAYG (*pay as you go*) dana pensiun menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan fiskal, terutama pada negara – negara berpenghasilan rendah dan direkomendasikan untuk reformasi ke skema *fully funded*.

Hal tersebut terjadi, akibat ketetapan regulasi yang menjelaskan bahwa Kementerian keuangan tetap mendanai dana pensiun sepenuhnya menggunakan dana APBN. Keberlanjutan fiskal mengacu pada kemampuan belanja pemerintah yang dibiayai secara lancar tanpa menyebabkan peningkatan utang pemerintah atau jumlah uang beredar yang tidak normal dari waktu ke waktu, jika hal ini terpenuhi maka APBN dianggap berkelanjutan atau sebaliknya (Adam et al 2010). Dengan adanya penelitian ini Dapat dinyatakan bahwa adanya penambahan dana pensiun maka hal tersebut dapat memberatkan fiskal di masa mendatang dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya reformasi skema dana pensiun untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Merujuk kepada hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab meningkatnya primary defisit disebabkan oleh dana pensiun yang di danai sepenuhnya oleh APBN. Penelitian ini menyarankan terkait aspek kebijakan dan regulasi bahwa pemerintah diharapkan untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi program dana pensiun ASN saat ini yaitu PAYG (manfaat pasti yang tidak didanai) menjadi *Fully funded* (iuran pasti).

DAFTAR PUSTAKA

- Abstract: THE OECD Global Pension Statistics Project - Overview of the financial wealth accumulated underfunded pension arrangements. (2006). In OECD. OECD.
- Adams, C., Ferrarini, B., & Park, D. (2010). Fiscal Sustainability in Developing Asia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1640264>
- Arifianto, A. (2004). Reformasi Sistem Jaminan sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang - Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas). *The SMERU Reserarch Institute*.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang* . Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan
- Benetrix A.S & lane P.R (2013) fiscal cyclicalilty and EMU journal of international money and finance 34C 164-176
- Bosworth, B., & Burtless, G. (2004). Pensioun Reform and Saving. *National Tax Journal, LVII, No 3*.
- Budiman, Y. R. (2022). *BPK Dorong Perbaikan Layanan Untuk Peserta Taspen*. Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Burger, P. (2012). Fiscal Sustainability and Fiscal Reaction. *international Business & Economics Research Journal*.
- Duraiswamy, P., & Doraiswamy, M. (1995). Implications for structural reforms for public private sector wage differentials in India. *Indian journal of labour economics*.
- Gayithri, K. (2009). Central civil servant pension payments. *Original Article*.
- Glinskaya, E., & Lokshin, M. (2005). Wage Differentials between the public and private sectors in india. *The World Bank*.
- Guillen, J. B. & Mosqueda, R. (2013). Pay as you Go System versus Fully Funded Pension in Peru. *Ecos De Economia*. ISSN 1657-4206.
- Gujarati,D. N & porter (2009) basic econometrics (5th ed). New york mcgraw hill
- Herrera, M. D. C. R. & Rivero. S. S. (2020). Fiscal Sustainability in Aging Societies: Evidence from Euro Area Countries. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su122410276>.
- Hubbard,R.G., O'Brian A.P., & raferty. (2012). macroeconomics new jersey pearson education.
- Huda, F. N., Firdaus, F. A., Nababan, Y. R., Ramadhan, M., Sari, T. P., Vanny, C. Damopolii, M. I. M., Arizky, S. P., Orrefsia, H. A. (2022). Kondisi Eksisting Dan Rencana Reformasi Program Pensiun Pns Di Indonesia. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Insukindro. (2018). The effect of twin shock on fiscal sustainability in Indonesia. *Economics and Sociology*. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-1/5
- Insukindro. (2018). The Effect of Twin Shock on Fiscal Sustainability In Indonesia. *Economics Sociolgy*. doi: 10.14254/2071-

- Insukindro. (2018). Keberlanjutan Fiskal: Pendekatan Pilihan Inter-Temporal & Studi Empiris Di Indonesia*). Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Keuangan, O. J. (2014). *Statistik Dana pensiun 2014*. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Laporan Keuangan Pemerintah pusat (AUDITED)*. Kementerian Keuangan .
- Pusat kebijakan sektor keuangan BADAN KEBIJAKAN FISKAL. (2016). *Desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil*.
- Rakhmawanto, A. (2014, November 17). Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil : Analisis Perspektif Perbaikan Sistem Pensiun Pns Dari Pay As You Gp Ke Fully Funded. *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS*, 8.
- Utomo, W., Wibowo, G., Marlina, I., Waristi, F. V., Romli, M., Irma, Y., & Amelia, D. Y. (2019). *Analisis keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (long term fiscal sustainability)*. Badan kebijakan fiskal kementerian keuangan.
- Wijaya, M. L., & Mokoginta, I. S. (2014). Identifikasi risiko fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. *Humanities and Social Science*, 1, 1-18.